


162

Dengan Semangat
Kita Lanjutkan
Yang Profesional



Tantangan Global di Hadapan Polri

Sederet prestasi nasional dan internasional yang dicapai Polri belakangan ini meski masih diwarnai kelemahan mendasar di sana-sini memperlihatkan upaya revitalisasi yang makin nyata di tubuh institusi negara yang satu ini. Tapi tantangan terbesar Polri ke depan adalah bagaimana beradaptasi dalam arus besar globalisasi yang bergerak sangat cepat. Sesiap apa Polri?

ADA sepenggal kalimat yang sekilas sepertinya sepele tapi jelas amat penting, dalam pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada upacara peringatan HUT ke-62 Polri di Silang Monas, Jakarta, awal Juli lalu. "Sering kerja keras Saudara kurang mendapat apresiasi dari masyarakat. Itu tidak perlu dirisaukan. Terima kritik yang fair dengan baik untuk introspeksi dan perbaikan."

Kritik? Ya, di tengah gelombang reformasi, sulit untuk menafikan bahwa Kepolisian Negara RI adalah salah satu institusi negara yang kerap mendapat sorotan dan kritik tajam. Polisi cukup sering dicap lalai memberi perlindungan kepada masyarakat. Polisi juga kerap dipandang lemah dalam menegakkan hukum, bahkan dipandang sarat dengan penyelewengan kekuasaan (*abuse of power*) akibat praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.

Seiring dengan upaya serius Presiden RI yang kini sedang menabuh genderang perang melawan *public enemy*, mulai dari narkoba, korupsi, judi, penyelundupan, hingga kriminal perbankan, sepenggal kalimat dari Presiden itu menjadi amat berarti. Menjadi amat penting, karena kalimat itu kemudian memunculkan sebuah pertanyaan penting pula: Mampukah Polri merevitalisasi diri untuk berfungsi sebagai instrumen negara bagi kebangkitan Indonesia baru, terutama dalam menghadapi arus besar globalisasi yang bergerak dengan sangat cepat?

Pertanyaan reflektif ini mendorong kita untuk memahami lebih dekat proses reformasi berikut arah revitalisasi Polri yang dibutuhkan ke depan. Lebih jauh, hal ini akan berguna untuk meyakinkan kita bahwa paradigma 'Bring The State Back In', yang saat ini diadopsi pemerintahan SBY, benar-benar ditopang oleh sejumlah institusi pelaksana kekuasaan negara seperti Polri," papar Kastorius Sinaga, pengajar Pascasarjana Universitas Indonesia (UI) yang pernah meneliti masalah Kepolisian untuk Asian Development Bank (ADB).

Faktanya, kepolisian sendiri memiliki banyak keterbatasan. Soal kuantitas misalnya, jumlah personel kepolisian sangat tidak memadai. Di Indonesia, rasio jumlah polisi dan penduduk sekitar 1 : 900. Masih jauh dari cukup seperti yang dianjurkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yakni 1 : 400. Bahkan jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga sekalipun, rasio jumlah personel kepolisian di Indonesia masih jauh dari ideal. Malaysia contohnya, di antara 312 penduduk terdapat satu orang polisi. Sedangkan di Singapura, rasionya seorang polisi untuk 250

penduduk. Tentu, pemenuhan rasio itu bukanlah hal yang mutlak. Di negara yang masyarakatnya memiliki kesadaran hukum dan disiplin tinggi tidak harus memenuhi rasio seperti yang dianjurkan PBB. Di Jepang, misalnya, perbandingan jumlah polisi dan penduduk hanya 1 : 520.

Di lain sisi, kondisi kesejahteraan sebagian besar para penjaga keamanan tersebut masih jauh dari standar layak. "Beberapa waktu lalu kami telah mengadakan penelitian bersama dengan Universitas Indonesia terkait berapa gaji yang layak untuk anggota Polri di Indonesia." "Diperoleh hasil (penelitian) bahwa gaji yang layak bagi aparat paling rendah adalah Rp 8,5 juta," ungkap Kapolri Jenderal (Pol.) Sutanto seuai perayaan HUT Polri ke-62 di silang Monas, awal Juni silam.

Tak heran jika Sutanto berjanji akan meningkatkan kesejahteraan anggota Polisi, salah satu diantaranya dengan menaikkan gaji anggota secara bertahap hingga mencapai jumlah minimal yang layak, yaitu Rp 8,5 juta perorang setiap bulannya. "Tentu harus kita tingkatkan, karena itu kita sudah mengusulkan kepada pemerintah (kenaikan gaji Polisi). Persoalannya, anggaran negara saat ini kan belum memadai, makanya kita coba lakukan bertahap untuk mencapai ke arah itu (minimal Rp 8,5 juta/bulan)," tambahnya.

Toh dalam serbaketerbatasan itu saja, kinerja polisi Indonesia bukannya tanpa prestasi. Upaya Kepolisian mentransformasi dirinya menjadi institusi yang lebih profesional dan mandiri, perlahan-lahan mulai mendapat respon positif. Dalam menangani beberapa kasus, seperti kriminalitas, terorisme, narkoba, pembalakan hutan dan korupsi yang ditangani aparat Kepolisian di berbagai daerah belakangan ini, Polri mampu menunjukkan profesionalismenya. Tak pelak, prestasi itu ikut meningkatkan pamor polisi sebagai penegak hukum, pengayom dan atribut pelayan masyarakat.

Sukses mengungkap pelaku bom Bali pada 2002 misalnya, jelas sebuah prestasi yang layak diapresiasi. Begitu juga ketika polisi berhasil menangkap pelaku perampokan dan pembunuhan berskala besar dan sadis. Kepolisian juga dengan cekatan mampu menangkap para tersangka anggota Front Pembela Islam (FPI), yang diduga sebagai pelaku kekerasan terhadap Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AK-KBB) belum lama ini. Tak hanya itu, Polri kini juga menyidik perwiranya yang melanggar hukum. Ini merupakan suatu kemajuan, meski masih terdengar ada

oknum polisi yang pungli. Bahkan, terakhir, kepolisian menangkap Mayjen (Purn) Muchdi Pr, tersangka pelaku pembunuhan Munir.

Namun, tak bisa pula dinafikan di balik prestasi itu kinerja aparat kepolisian bukannya tanpa kelemahan. Dalam banyak kasus, penanganan demonstrasi justru membangkitkan banyak kritik. Jajaran kepolisian kerap dituding sebagai biang pemicu kerusuhan, bukan pencipta ketertiban. Belum lagi bila itu terkait dengan pertikaian antara kepolisian dan tentara di sejumlah daerah rawan konflik. Begitu pula dengan kasus konflik aparat kepolisian dan warga yang juga masih tergolong tinggi.

Di sisi lain, tantangan Polri ke depan justru kian membesar seiring perubahan zaman. Arus globalisasi dan keterbukaan hampir menghilangkan batas-batas negara, sehingga apa saja dalam kecepatan yang 'tak terbendung' akan bergerak melintasinya. Demikian pula dengan kejahatan. Multinational crime, international organized crime, dengan segala bentuknya – mulai dari terorisme, *cybercrime*, *money laundering*, penyelundupan senpi handak, perompakan, narkoba, perdagangan wanita/anak, hingga kejahatan ekonomi — dapat dengan cepat merambah ke seluruh wilayah republik ini.

Seperti diakui Kapolri Jenderal (Pol.) Sutanto, tantangan Polri ke depan untuk mewujudkan situasi kamtibmas yang kondusif bagi upaya peningkatan kesejahteraan didapatkan pada tantangan di berbagai aspek kehidupan. "Tantangan itu hadir hampir di semua aspek kehidupan, mulai dari politik, ekonomi, sosial-budaya, dan keamanan," paparnya.

Dalam aspek politik misalnya, menurut Sutanto amat berkaitan dengan kualitas pemahaman budaya politik yang dibangun melalui pendidikan, komunikasi dan partisipasi politik yang belum sepenuhnya mampu memperkuat sendi-sendi demokrasi. "Ada kalanya kebebasan dan keterbukaan diaktualisasikan dengan cara-cara yang justru bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi, seperti pemaksaan kehendak melalui pengerahan kekuatan, *money politic* dan perbuatan lain yang melanggar rambu-rambu hukum. Semua itu masih menjadi isu sentral dalam kehidupan politik yang dapat menimbulkan ketidaksetabilan di bidang keamanan."

Sementara tantangan dalam aspek ekonomi, Sutanto menegaskan bahwa Polri kini dihadapkan pada berkembangnya sistem pasar bebas yang belum sepenuhnya didukung oleh infrastruktur yang kuat. Sektor



industri, pertanian dan jasa belum kompetitif, daya saing masih lemah, sementara pasar domestik didominasi produk impor. Kondisi seperti ini turut mempengaruhi meluasnya pengangguran dan terjadinya kesenjangan kaya-miskin yang semakin nyata, dan ini jelas merupakan faktor kriminogen bagi instabilitas Kamtibmas," tambahnya.

Begitu pula dalam aspek sosial budaya, yang diwarnai melunturnya nilai-nilai luhur yang menempatkan akal budi sebagai suatu kehormatan ke arah penguasaan yang bersifat materil menjadi tujuan. Buntutnya, hal ini menyuburkan perilaku korupsi, kolusi dan nepotisme. Kehormatan telah dinilai dari nilai kekayaan materi dan uang serta gaya hidup yang konsumtif, menyebabkan makin longgarnya ikatan sosial. Jelas kondisi ini sangat rentan terhadap timbulnya masalah di bidang keamanan.

Sedangkan tantangan dalam aspek keamanan, menurut Sutanto, Polri kini dihadapkan pada berkembangnya suasana konflik yang dilatarbelakangi masalah agama

dan etnis, gagasan dan tindakan separatisme, kriminalitas yang secara kuantitas dan kualitas terus meningkat, perilaku kekerasan yang semakin intens, serta pengembangan isu ketidakadilan ekonomi dan sosial. "Semua kondisi itu membuka dan mengundang keterlibatan lembaga-lembaga internasional dalam upaya penyelesaiannya dengan memaksakan penerapan standar global. Ini artinya arus globalisasi membawa tantangan baru bagi jajaran Polri, paling tidak dalam dua aspek: sumber daya manusia dan teknologi." ungkapnya.

Karena itu, kata Sutanto, polisi dituntut bukan hanya lebih profesional, melainkan juga lebih berwawasan, berintegritas, dan bermartabat. Secara teknis dalam pelaksanaannya di lapangan, lanjutnya, tentu saja perlu digalang kerjasama internasional, baik melalui Interpol, ASEANAPOL, dan bentuk-bentuk kerjasama antarnegara lainnya, baik di bidang upaya memerangi kejahatan secara terpadu maupun kerjasama dalam bidang pendidikan dan latihan. Juga penting dibentuknya

integrated data base system antarnegara yang tergabung dalam Interpol dan ASEANAPOL.

Perkembangan sosial politik dan keamanan pascareformasi menunjukkan kondisi yang fluktuatif, lebih-lebih akibat kondisi global dunia yang belakangan makin sulit diprediksi dalam semua aspek. Tuntutan publik akan supremasi hukum mengandung konsekuensi Polri harus mampu menegakkan hukum dan mengusut tuntas setiap tindak kriminal. Dan tantangan ini semakin kompleks, manakala tren kejahatan lintasnegara berkembang seiring dengan proses globalisasi.

Benar-benar sebuah tugas yang amat berat bagi Polri ke depan. Ada banyak hal yang masih harus dibenahi agar mampu mencapai sasaran tersebut. Bagaimanapun, seberat apapun tantangan yang dihadapi, hanya ada satu hal yang mampu membuat perubahan posisi Polri akan membuahkan hasil: jika lembaga ini tumbuh menjadi alat negara yang berpihak pada keadilan dan kepentingan rakyat! [JETE 02]